

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah hutan dan lahan di Kalimantan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan kebakaran dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6,715 ha. Sementara Kalimantan Tengah 44.769 ha, Kalimantan Barat 25.900 ha, Kalimantan Selatan 19.490 ha, dan Kalimantan Utara 1.444 ha. Kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan dampak negatif dari polusi udara dan akibat dari hutan dan lahan tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat, baik materiil maupun material. Kebaran hutan dan lahan tersebut dilakukan oleh beberapa perusahaan yang beroprasi di bidang industri kelapa sawit. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan, terkait penegakan hukum terhadap korporasi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif karena menyambung satu pasal dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hasil dari penelitian terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan disebabkan oleh faktor tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan belum dilaksanakan secara optimal.

Kata Kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, Korporasi, Penegakan Hukum

ABSTRACT

This research is motivated by forest and land fire events in several regions of Indonesia. One particular concern is forests and land in Kalimantan. Based on data from the Ministry of Environment and Forestry, the area of fire forests and land in East Kalimantan in 2019 will reach 6,715 ha. While Central Kalimantan is 44,769 ha, West Kalimantan is 25,900 ha, South Kalimantan is 19,490 ha, and North Kalimantan is 1,444 ha. Forest and land fires that cause negative impacts from air pollution and the consequences of these forests and land cause harm to the community, both material and non-material. Forest and land cover is carried out by several companies operating in the palm oil industry. This study examines the factors that cause forest and land fires that occur in Kalimantan, related to law enforcement against corporations in terms of Law Number 32 Year 2009 Regarding Environmental Protection and Management, Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The author uses a normative juridical method that examines secondary data with descriptive analytical research specifications. Besides the data collection techniques used in this research is the study of literature. The data analysis method in this study is qualitative because it connects one article with another article in the laws and regulations used. The results of research on forest and land fires in Kalimantan are caused by factors that are not in accordance with applicable laws and regulations and law enforcement against cases of forest and land fires in Kalimantan has not been carried out optimally.

Keywords: Forest and Land Fires, Corporation, Law Enforcement

KATA PENGANTAR